

## **22 PESERTA IKUTI TES TULIS KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN JAMBI**

**Selasa, 09 Juli 2019 - Shopian Hadi**

KBRN, Jambi : Sebanyak 22 pesertaÂ mengikuti tes tertulisÂ seleksi Calon Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Pasar Kota Jambi, Selasa pagi (9/7/2019). Dijelaskan Asisten Ombudsman Republik Indonesia, yang jugaÂ Panitia Seleksi Calon Kepala Perwakilan, Awidya Mahadewi , dari 23 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis, ada satu peserta yang tidak hadir mengikuti tes tanpa keterangan sehingga dinyatakan gugur dalam seleksi, yaitu atas nama Juariah.

Ditambahkannya, tes terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama untuk soal pilihan ganda, dan sesi kedua untuk soal isian atau essay.Â Dalam soal essay, panitia seleksiÂ akan melihat kemampuan manajerial peserta seleksi, termasuk potensi peserta untuk melakukan pemeriksaan laporan masyarakat. "Pada hari ini kita melakukan tes tertulis. TesÂ tertulis itu ada dua type soal, pertama pilihan ganda dilanjutkan dengan essay. Di essay kita melihat kemampuan manajerialnya. Disitu kita melihat potensi peserta melakukan pemeriksaan laporan masyarakat seperti apa,"ujarÂ Awidya Mahadewi.

Dijelaskannya, , sosok kepala perwakilan Ombudsman yang dicari dalam seleksi ini adalah sosok yang berintegritas, tidak mempunyai cacat dalam pengalaman, jujur,Â mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai jaringan yang luas dan jika bisa merupakan sosok yang dikenal dan disegani di Jambi.

Hasil tes tertulis akan diumumkan sekitar pukul 9 malam nanti di website resmi Ombudsman RepublikÂ Indonesia.Â Dari 22 peserta tes tertulis, hanya empat peserta yang nantinya akan berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu assessment test, yang dijadwalkan berlangsung besok.

Diantara 22 peserta tes tertulis yang hadir, terdapat salah satu peserta yang berstatus tersangka kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMK Bagimu Negeri Tanjungjabung Timur, berinisial SW.Â MenurutÂ Awidya Mahadewi, sepanjang status hukum yang bersangkutan bukan terpidana, maka yang bersangkutan masih bisa mengikuti seleksi. Namun untuk hasil akhirnya tergantung dari hasil seleksi, termasuk adanya masukan dari masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan . " Informasi dan masukan dari amsyarakat tentang calon kepala perwakilan akan menjadi bahan pertimbangan kami," ujarnya.